**Dampak Sosial Ekonomi Akibat Penambangan Emas Pada
Lahan Pertanian Di Kabupaten Sijunjung**

***Socio-Economic Impacts of Gold Mining on Agricultural Land
in Sijunjung Regency***

Taufiqurrahman¹, Roni Jarlis², Andi Alatas³, Ananto⁴

^{1,2,3,4}Departemen Agroindustri, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Padang

Corresponden author: taufiqtann@gmail.com

Abstrak

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam menopang ekonomi kehidupan masyarakat di Kecamatan Kupitan. Keberadaan sawah sebagai lahan pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dilakukannya Penambangan Emas rakyat di atas lahan pertanian basah (sawah) di Kabupaten Sijunjung khususnya di Kecamatan Kupitan telah memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak yang paling nyata adalah hilangnya ratusan hektar lahan pertanian khususnya lahan basah (sawah) yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kupitan. Lahan yang tidak di-recovery pasca penambangan, sekarang menjadi lahan terlantar yang ditumbuhi *duri lodan* dan sebagian besarnya menjadi kolam yang berisi genangan air. Di Kabupaten Sijunjung, ada empat kecamatan yang aktif melakukan penambangan di atas tanah ulayat (tanah adat), yakni Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Koto VII, Kecamatan IV Nagari, dan Kecamatan Kupitan. Hanya saja di tiga kecamatan lainnya, penambangan banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai sehingga kerusakan yang ditimbulkan lebih pada dampak lingkungan daripada dampak sosial dan ekonomi, seperti longsor, erosi, pencemaran air sungai karena mercury, dan matinya biota sungai. Namun untuk Kecamatan Kupitan, penambangan dilakukan di lahan sawah produktif. Sawah yang sebelumnya menjadi lumbung padi dan menghasilkan panen secara teratur. Setelah penambangan dilakukan, sawah-sawah itu menjadi lahan terlantar, dan dalam jangka panjang menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Penambangan Emas, Lahan Pertanian, Kecamatan Kupitan*

Abstract

Farming is a main sector in supporting people economic life of Kupitan Subdistrict. The existence of rice fields has become an important thing to keep the sustainable of people economic activities. Gold mining activities on the rice field in Sijunjung Regency,

especially at Kupitan has brought some impacts toward the society life. The most significance one is the decreasing of hundred hectares of rice fields in Sijunjung regency, particularly at Kupitan subdistrict. In which, it has been a main sector of people economic life there. Unrecovered post mining sites turn into useless and unproductive lands with “duri lodan” on them and the most parts are becoming big pools which full of water. In Sijunjung regency, there are four sub districts which actively doing gold mining activity on tanah ulayat (heritage land). They are Sijunjung subdistrict, Koto VII subdistrict, IV Nagari subdistrict, and Kupitan subdistrict. The other three sub districts, the mining activity “only” done along the river banks so the damages caused by mostly to the environment such as landslides, Polluted water by mercury, and the extinctive of river biota. On the other hand, at Kupitan subdistrict, the mining activities are done on the productive lands. Many of rice fields which for years have been being major food supply. By harvesting them regularly, soon become useless and unproductive that for the next time could bring several new problems for local people social life and economic.

Key Word: *Gold Mining, Rice Field, Kupitan*

1. Pendahuluan

Penambangan emas di atas lahan pertanian di Kabupaten Sijunjung khususnya di kecamatan Kupitan sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini. Awalnya penambangan dilakukan dengan alat manual dan mesin dompeng berkapasitas kecil. Namun setelah tahun 2000-an, penambangan mulai dilakukan dengan menggunakan alat berat (keruk) eskavator, yang bisa menggali tanah sampai pada kedalaman 30 meter.[1]

Penambangan emas di atas lahan pertanian ini sebenarnya menjadi dilema tersendiri, baik bagi pemerintahan daerah maupun bagi masyarakat. Di satu sisi penambangan di atas lahan pertanian yang dilakukan masyarakat adalah aktivitas illegal, tidak ada izin dari pemerintah. Namun di sisi lain, sulitnya perekonomian dan sempitnya peluang kerja membuat masyarakat berusaha mencari alternatif lain (selain pertanian) untuk sumber pendapatan. Sementara masyarakat merasa punya hak untuk melakukan aktivitas ekonomi di atas lahan milik pribadi dan kaumnya. Bagi masyarakat, menambang emas menjadi jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan besar dalam waktu cepat. Dalam hitungan minggu, mereka bisa mendapatkan uang milyaran rupiah dari aktivitas penambangan tersebut.[2]

Dengan kenyataan seperti ini, tentu saja menambang emas bagi masyarakat menjadi cara yang menggiurkan untuk bisa cepat mendapatkan hasil dan menjadi kaya. Dibanding bertani dan bercocok tanam, dengan proses lama dan hasil yang sedikit, mereka rela membongkar lahan pertanian mereka yang subur dengan alat berat dengan resiko tidak bisa lagi ditanami padi.

Aktivitas penambangan ini berlangsung seperti efek domino, terutama untuk sawah yang berada di satu hamparan. Kalau ada satu orang yang sudah mulai menambang di hamparan lokasi tersebut, maka biasanya akan diikuti oleh pemilik sawah lainnya. Kenapa? Pertama karena tergiur dengan keuntungan besar dan instan. Kalau sawah di sebelahnya mengeluarkan emas yang banyak, ada keyakinan di dalam sawah mereka pasti ada juga kandungan emas yang banyak pula.[1]

Kedua, karena sawah *sepadan* (berbatasan langsung) dengan sawah yang ditambang berpotensi mengalami erosi. Runtuh dan tidak bisa menahan air. Intinya kalau ada sawah yang di sebelah ditambang, maka sawah yang berbatasan pematang dengan sawah itu tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Daripada

menghadapi resiko tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik ditambang juga. Inilah yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk ikut menambang sawahnya. Akhirnya di satu hamparan persawahan, biasanya kalau ada satu orang yang memulai melakukan penambangan emas, maka yang lain pasti akan mengikuti, sehingga area itu menjadi spot penambangan di sebuah wilayah.[1]

Ketiga, janji dan iming-iming dari investor yang memiliki modal, bahwa sawah yang sudah ditambang akan didatarkan dan dikembalikan posisinya seperti semula. Ada yang dipenuhi dan ada juga yang tidak karena alasan investor juga merugi. Apalagi tidak ada emas yang “naik” di lokasi itu. Kalaupun ada Cuma sedikit dan tidak bisa menutupi biaya operasional penambangan.[3]

Biasanya penambangan emas kalau tidak dilakukan oleh yang punya tanah/sawah, dia akan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai investor untuk menambang di sawah mereka, dengan hitungan bagi hasil antara pemilik tanah/sawah dengan pemodal yang melakukan penambangan. [4]

Peta Pelaku Penambangan Rakyat di Kecamatan Kupitan

Penambangan Emas Rakyat seperti ini melibatkan banyak aktor dalam sebuah struktur fungsional. Aktor pertama tentu pemilik tanah/ulayat yang lokasinya akan dikeruk dan ditambang. Pemilik tanah ini biasa disebut “Takur”. Para takur ini biasanya seorang mamak atau satu keluarga di sebuah rumah gadang yang menguasai tanah ulayat. Semakin banyak ulayatnya diolah untuk penambangan, semakin besar peluang para takur untuk mendapat keuntungan. [5]

Posisi lainnya adalah investor. Yakni mereka yang memodali biaya penambangan sampai didapatkannya emas. Investor ini menanggung seratus persen resiko kerugian dari penambangan ini. Termasuk biaya pekerja hari per hari yang jumlahnya rata-rata sepuluh sampai limabelas orang tiap lubang, memobilisir alat berat (eskavator) ke lokasi serta membayar sewa alat jika dia tidak punya alat sendiri. Tapi rata-rata para investor ini mereka yang memiliki alat berat sendiri. [1]

Banyak juga para pemilik ulayat (takur) menjadi investor pada penambangan di atas ulayatnya sendiri. Semua resiko dan keuntungan diambil sendiri. Ini memang mirip seperti perjudian. Kalau tambangnya “berisi”, maka bisa jadi satu keluarga kaya mendadak. Tapi kalau tidak bisa habis modal dan sudah ada.[6]

Untuk mengurangi resiko kerugian, biasanya modal untuk sebuah penambangan ditanggung secara kolektif. Kongsi tiga orang sampai empat orang untuk satu lokasi. Misalnya dalam satu lokasi biaya penambangan Rp. 150.000.000,- maka biaya ini bisa dibagi rata Rp. 50.000.000,- per orang. Atau juga bisa sesuai dengan kemampuan para investor. Bisa bervariasi dengan konsekwensi hitungan bagi hasil juga bervariasi sesuai penyertaan modal yang diberikan. [7]

Haryadi salah seorang penambang di Batu Manjukur menjelaskan, modal menambang satu lubang itu antara seratus sampai seratus limapuluh juta rupiah, itu kalau penambangan berjalan normal. Belum lagi kalau ada rahazia, alat berat kena sita aparat, itu bisa lebih besar lagi biayanya.

Menurut Haryadi, di satu lokasi penambangan bisa selama dua minggu bekerja belum menghasilkan apa-apa, dan selama itu biaya operasional, sewa alat berat per hari, BBM, biaya pekerja dan operator tetap dikeluarkan. Menghasilkan atau tidak menghasilkan, gaji orang tetap harus dibayarkan, katanya. [8]

Hitung-hitungan pembagiannya, menurut Haryadi, biasanya untuk pemilik lahan atau takur antara 27%-30%, tergantung lokasinya. Di lokasi yang diperkirakan banyak emasnya, bisa sampai 30% untuk pemilik lahan. Selebihnya untuk investor. Dari 70% itulah investor mengeluarkan semua biaya operasional. Untuk pekerja lapangan 5% dan biaya operasional lain-lain ini dan itu, termasuk biaya “koordinasi” ke pihak-pihak tertentu. Biaya koordinasi ini tidak ada standarnya. Di tidak menyebutkan siapa saja pihak tertentu ini. Maklumlah pak, penambangan ilegal, katanya. Sisanya biasanya sekitar 50% menjadi keuntungan bagi investor. Kalau dia kongsi bertiga, maka hasil 50% ini dibagi tiga.[9]

Bagian yang tidak kalau penting dalam siklus penambangan ini adalah pekerja. Rata-rata setiap Investor punya pekerja andalannya sendiri. Mereka punya operator alat yang dipercaya, yang punya skill mengeruk ke bagian paling dalam sampai ke batas-batas tanah orang yang bersebelahan (batas sipadan). Kemudian mandor, tukang air, dan pekerjaan lain yang membutuhkan keahlian spesifik. Tapi tidak hanya keahlian. Juga kepercayaan.[4]

Dalam sebuah pekerjaan penambangan, ada adat kebiasaan yang mereka patuhi, yakni jumlah anggota yang bekerja di satu lubang. Biasanya mereka tidak lebih dari limabelas orang. Kelimabelas orang itu bekerja dengan syarat ikut terlibat dari awal. Mulai dari pembukaan lahan sampai selesai. Kalau dari awal mereka cuma duabelas orang, maka duabelas orang itulah yang akan bekerja sampai selesai. Tidak ada istilahnya pekerja yang naik di tengah jalan. Misalnya setelah hasil penambangan mulai terlihat, kemudian ada orang yang ingin bergabung, maka mereka yang sudah bekerja dari awal akan menolaknya, karena penambahan anggota di tengah jalan itu akan memperkecil nominal pembagian hasil untuk mereka.

Di luar pekerja yang dibayar oleh investor yang mempekerjakan mereka. Adalagi pekerja lepas yang bekerja di sekitar lubang penambangan. Mereka para perempuan dan ibu-ibu yang mendulang material buangan dan sisa-sisa emas yang sudah disaring oleh oleh pekerja tambang. Ibu-ibu yang bekerja seperti ini di sebut penampung, atau dalam bahasa daerahnya disebut “Penampung”. Mereka menampung sisa-sisa yang pasir dan kerikil yang dibawah untuk kemudian didulang lagi untuk mendapatkan emas.[10]

Penghasilan ibu-ibu penampung ini cukup lumayan, bisa sampai Rp. 250.000 per hari. Dan ini cukup menghidupi ekonomi domestik mereka terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dapur. Jadi jika di suatu nagari penambangan emas sudah menurun atau tidak ada sama sekali, maka dampaknya langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat, pasar-pasar tradisional lesu dan daya beli anjlok.[11]

Hanya saja, pola kerja ibu-ibu penampung ini memang tidak cukup menjaga harkat dan martabat perempuan, khususnya bagi perempuan Minang. Terkadang sudah tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama. Tidak jarang ibu-ibu itu pulang jam 02.00 atau bahkan jam 03.00 dinihari. Bekerja menampung sampai malam, bercampur dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya di satu lokasi sampai larut malam. Ini sesuatu yang tidak elok dalam pandangan agama dan adat Minangkabau. Tidak jarang hal ini menjadi salah satu pemicu terhadap ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Terjadi perselingkuhan dan lain-lain.

Tabel: Data Perkiraan Luas Lahan Sawah yang Menjadi Area Penambangan

No	LOKASI			LUAS (HA)	RECOVERY
1	Lubuk	Batu	Nagari	Padang 20 Hektar	0

	Sibusuk.		
2	Tanlawe Nagari Padang Sibusuk	25 Hektar	5 Hektar
3.	Ona, Pasie dan Tanla, Nag. Pd Sibusuk	17 Hektar	8 Hektar
4	Cicingan sampai ke Gurun Nag. Pd Sibusuk	12 Hektar	5 Hektar
5.	Nagari Pamuatan	10 Hektar	3 Hektar
6	Nagari Batu manjular	18 Hektar	6 Hektar
	Total	105 Hektar	27 Hektar

Dari 731 HA lahan sawah di Kecamatan Kupitan (Data BPS.2019), sebanyak 105 HA sudah ditambang dan 27 HA yang hanya direcovery. Artinya lahan yang mengalami recovery tidak sampai 1/3 dari lahan yang ditambang. Selebihnya menjadi lahan terlantar. Lahan yang tidak bisa direcovery itu rata-rata ditambang pakai mesin dompok, sehingga tanahnya terbuang bersama aliran air dan bercampur dengan batu kerikil.[8]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang pokok kajiannya adalah Kajian Sosiologi yang menempatkan Masyarakat Penambang Emas di Kecamatan Kupitan sebagai unit analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana kedalaman informasi merupakan acuan utama dalam menarik kesimpulan Adapun data-data kuantitatif yang ditampilkan lebih sebagai penguat dalam melakukan analisis.[2]

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*), di mana penulis mengidentifikasi beberapa informan, baik informan utama/informan kunci yang menjadi pelaku langsung dalam proses penambangan ini, dan juga informan pengamat, yang mengalami dampak-dampak sosial dari akibat penambangan emas ini. Kedua, adalah dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan (*Observations*). Melihat proses yang terjadi di lapangan, berbaur dalam kehidupan sosial masyarakat Kupitan yang menjadi subjek dari penelitian, atau yang dalam penelitian kualitatif dikenal dengan metode Pengamat Partisipan[9]

Data dalam penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara yang mendalam, Foto-foto dan dokumen tertulis lainnya yang bertahan lama. Kemudian analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, membuat pengelompokan, melakukan pemilahan dan dilakukan secara terus menerus sampai pada kesimpulan[12]

3. Hasil dan Pembahasan

Ada tiga permasalahan sosial yang muncul akibat penambangan emas di atas lahan pertanian ini. Pertama adalah potensi konflik horizontal antar kerabat dan saudara yang memiliki hak dan kekuasaan terhadap lahan yang dieksploitasi tersebut. Kedua adalah potensi kehilangan sumberdaya ekonomi pasca penambangan dan ancaman kemiskinan. Potensi konflik antara mamak dan kemenakan (Paman dan Keponakan) merupakan konflik yang paling sering terjadi. Dari survey dan wawancara yang peneliti lakukan, konflik pertama dalam penambangan banyak terjadi antara mamak dan kemenakan. Dalam sistim kekerabatan di Minangkabau, hal ini bisa dipahami karena penguasaan

lahan dikuasai oleh Mamak. Mamaklah yang berkuasa menentukan. Memberi izin dan membuat persetujuan. [13]

Dalam tataran ini kasus-kasusnya ada beragam. Ada mamaknya yang ingin menambang sawah, tapi kemenakannya tidak setuju karena sawah mereka akan hancur dan tidak bisa ditanami lagi. Ada juga kasus sebaliknya, kemenakannya yang ingin menambang di sawah mereka, tapi mamaknya tidak setuju. [14] Alasan-alasan terhadap ketidaksetujuan ini beragam, ada alasan yang sangat prinsip, karena mereka memandang sawah merupakan aset untuk generasi ke depan.

Ada juga konflik terjadi antara saudara sekandung, karena memang biasanya lahan sawah yang diwariskan orang tua (ibu dalam garis Matriakhaat) tidak dibagi kepemilikannya. Ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat untuk ditambang. Potensi-potensi konflik ini kemudian menjelma menjadi konflik yang tajam ketika salah satu pihak memaksakan kehendaknya dan menambang di lahan yang memang secara kepemilikan adalah lahan milih bersama (suku atau keluarga). [6] Terkait hal menyetujui dan tidak menyetujui adalah konflik awal dalam penambangan emas ini.

Konflik sosial berikutnya terjadi dalam tahap bagi hasil. Fase bagi hasil ini menjadi proses yang menarik dalam mengamati tindakan-tindakan sosial suatu kelompok masyarakat. Penulis amati, dalam kasus penambangan ini memang memunculkan curiga tingkat tinggi dari pihak-pihak yang terlibat. Siapa dapat bagian berapa? Kenapa saya Cuma dapat sedikit? Kenapa yang lain banyak? Hal ini bisa dipahami karena penambangan memang melibatkan uang yang tidak sedikit.

Secara hitungan bisnis, bagi hasil dari penambangan emas ini sudah disepakati dari awal. Secara umum dan ketentuan yang biasa dipakai, untuk Pemodal 70% Persen, untuk biaya kordinasi 5% persen, biaya pekerja 5%, untuk takur (pemilik lahan) 27% persen. [9]

Biasanya yang sering menimbulkan konflik adalah bagian untuk pemilik lahan. Bagian Takur. Takur ini biasanya seorang mamak, dan dia harus membagi hasil penambangan itu kepada seluruh keponakan atau saudaranya yang berhak. Termasuk saudara/kerabat yang diperantauan yang juga berhak atas bagi hasil itu. Dari beberapa kasaksian informan, pembagian yang tidak adil itu terjadi di sini. Mereka yang terlibat langsung dalam proses penambangan ini (baik mamak ataupun kemenakan) melakukan pemotongan untuk biaya ini dan keperluan itu. Kemudian sisanya baru diserahkan. [15]

Konflik selanjutnya adalah antara pemodel dangan pemilik lahan. Adanya ketidaktransparan hasil yang didapat. Berapa emas yang “naik” pada hari itu. Jumlahnya bisa disembunyikan atau dimanipulasi oleh mereka yang bekerja di lapangan. Apalagi kalau tidak ada pihak pemilik lahan yang mengawasi pekerjaan penambangan itu setiap hari. Ujung-ujungnya biasanya ada kesepakatan yang tidak tertunaikan. [16] Misalnya janji pamodal untuk mendatarkan kembali lahan seperti semula tidak dilakukan, mereka kabur begitu saja dan mengeluarkan diam-diam alat berat dari lokasi tanpa merecovery lahan seperti yang dijanjikan. Ini kasus yang sering terjadi, kenapa lahan-lahan pertanian yang sudah ditambang menjadi lahan terbengkalai, menyisakan tumpukan material bumi yang menggunung, dan di sisi lainnya meninggalkan lubang dalam yang menganga. Sebelumnya itu adalah sawah dan lahan pertanian yang subur.

Dari kasus-kasus konflik sosial yang penulis temukan di lapangan akibat penambangan ini, konfliknya permanen. Artinya meskipun penambangan di ulayat mereka sudah selesai bertahun-tahun yang lalu, dan sawah yang ditambang sudah dikembalikan, hubungan-hubungan sosial tidak kembali membaik seperti semula. Ini

memang harga yang mahal yang harus dibayar dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Permasalahan kedua adalah permasalahan hilangnya lahan sebagai sumber mata pencaharian dan ancaman kemiskinan. Permasalahan ini menjadi sangat serius di Kecamatan Kupitan, mengingat pertanian subsistensi merupakan sumber ekonomi penting bagi masyarakat.

Penambangan merupakan aktivitas ekonomi musiman. Ada masa jaya dan ada masa surutnya. Rata-rata, menurut pelaku penambang, satu lokasi penambangan itu hanya bertahan 2 sampai 3 bulan saja. Setelah itu habis. Untuk tambang yang “berisi” itu, hanya dalam satu atau dua minggu saja yang bisa mengeluarkan emas sampai hitungan kilogram. Setelah itu mulai mengalami penurunan. [12]

Bagi pemilik ulayat, hanya dalam waktu itulah mereka mengumpulkan uang. Kecuali mereka punya titik-titik lubang lain untuk dieksploitasi. Kebanyakan mereka berpikir konsumtif terhadap uang hasil tambang yang mereka dapatkan. Rata-rata menggunakannya untuk membangun atau merehab rumah. Mereka yang berorientasi religius, akan merencanakan pergi haji dan umroh. Juga kalau hasilnya banyak mereka gunakan untuk membangun Surau dan Mushalla di kaumnya. [17]

Ada karakter berpikir yang khas bagi masyarakat penambang ini. Bahwa uang hasil tambang harus “*babakeh*”, (berbekas). Akhirul, salah seorang pelaku penambang mengatakan, kalau tambang kita berisi, uang yang didapat harus ada digunakan untuk sesuatu yang bisa dilihat orang banyak. Kalau tidak, orang akan mengira bahwa tambang kita tidak berhasil. Tidak ada bekasnya. Rumah tidak diperbaiki. Mobil tidak terbeli. Ada keyakinan di masyarakat, uang hasil tambang emas itu uang panas. Apalagi kalau yang ditambang itu tanah ulayat atau tanah kaum. [18] *Dapat di semak habis di rimba*. Begitu istilahnya kata Akhirul. Jadi jika tidak segera dipakai dia akan habis begitu saja. [19]

Mindset berpikir seperti ini berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi mereka. Situasi yang pasti yang mereka hadapi ke depan adalah hilangnya lahan bertanian untuk bercocok tanam, sementara usaha alternatif/pengganti untuk menopang kehidupan mereka selanjutnya tidak ada. Ada juga yang berpikir membuat ruko atau tempat usaha, tapi itu juga untuk disewakan, bukan untuk berdagang atau membuat usaha sendiri, karena merubah pola pikir karakter ekonomi dari bertani ke pedagang juga bukan persoalan mudah. [20]

Ada beberapa keluarga yang penulis temui di Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan yang mengaku hidupnya lebih sulit sebelum sawahnya ditambang. Sebelum ditambang sawahnya minimal menghasilkan dua ribu padi (sebuatan seribu atau duaribu padi adalah ukuran pendapatan panen di masyarakat Minangkabau), namun sekarang dia harus menggarap sawah orang lain karena tak ada lagi yang bisa dikerjakan. Bagi hasil penambangan sudah lama habis untuk memperbaiki rumah. [7]

Bagi mereka yang hidup di rantau, hal ini relatif tidak bermasalah, karena memang secara finansial mereka tidak tergantung dengan penghasilan sawah yang ada di kampung halaman. Mereka sudah hidup dengan usaha di rantau, dan hasil penambangan ini hanya sebagai uang insidental yang bisa digunakan untuk menambah modal usaha atau untuk keperluan besar lainnya seperti naik haji dan umroh. [11]

Permasalahan ketiga adalah rusaknya tatanan sosial dan agama yang selama ini menjadi pegangan hidup di masyarakat. Seperti yang penulis jelaskan di atas, bahwa penambangan emas rakyat seperti ini bukan hanya aktivitas ekonomi. Tapi membentuk perilaku-perilaku dan kebiasaan baru di masyarakat. Aktivitas penambangan

meninggalkan “budaya tambang”. Gaya hidup dan interaksi sosial di antara pelakunya. Maraknya dunia hiburan dan café-café yang beroperasi sampai tengah malam merupakan dampak sosial dari penambangan.

Budaya tambang, kalau bisa kita sebut sebagai budaya rendah. Adalah produk dari interaksi para pelaku tambang yang pragmatis dan materialistis. Orientasi terhadap uang yang sangat kuat. Uang menjadi segalanya. Bahkan lebih berharga dari hubungan-hubungan sosial kekerabatan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Orang menghargai orang lain dengan uang. Kerja dan uang. Struktur sosial yang sudah terbentuk selama ini bisa diobrak abrik. Mamak yang selama ini dalam kehidupan sosial adalah sosok yang dihormati, karena urusan penambangan ini bisa menjadi sosok yang dimusuhi.[4]

Dalam hal keluarga pun demikian, beberapa kasus perceraian sudah penulis temukan akibat pekerjaan penambangan ini. Perselingkuhan di lokasi tambang. Pelecehan terhadap perempuan, dan tingginya kriminalitas terutama narkoba yang terjadi pada anak-anak. Beberapa kasus narkoba, anak-anak yang menghisap lem (*ngelem*) di kecamatan Kupitan, kebanyakan mereka yang malam hari ditinggal oleh ibunya pergi melarut/menampung, menjadi anak yang tidak terurus. Menjalani hidup yang liar. Ini memerapakan persoalan sosial yang menjadi dampak langsung dari aktivitas penambangan emas di kecamatan Kupitan.[21]

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penambangan emas di atas lahan pertanian memang rentan terhadap konflik sosial. Apalagi lahan pertanian di Minangkabau khususnya di Kecamatan Kupitan adalah milik kaum dan keluarga, karena lahan pertanian diwariskan secara turun temurun.

Karena persoalan lahan pertanian berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, maka banyak kepentingan yang terganggu. Jadi jika penambangan dilakukan tidak dengan kesepakatan yang bulat dari semua anggota kaum atau keluarga, maka itu akan berpotensi menimbulkan konflik horizontal secara permanen.

Selanjutnya, penambangan di atas lahan pertanian berpotensi menimbulkan kemiskinan kolektif di suatu kaum. Ketika lahan pertanian itu tidak lagi bisa dimanfaatkan pasca penambangan, maka akan ada banyak keluarga yang akan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, karena meskipun mereka punya uang hasil pertambangan, kebanyakan uang itu habis untuk kebutuhan konsumtif, dan mereka tidak punya perencanaan alternatif aktivitas ekonomi pasca penambangan. Ini berpotensi melahirkan kemiskinan kolektif dan permanen.

Kemudian, menurunnya kualitas hubungan sosial. Rentannya keluarga terhadap kerusakan moral yang terjadi dalam rumah tangga, merupakan dampak langsung yang dapat dirasakan sampai sekarang. Nagari-nagari di kecamatan Kupitan sampai sekarang kesulitan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang timbul akibat penambangan ini.

Daftar Pustaka

- [1] Darmayani et al., *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. 2021.
- [2] L. S. Gunawan, “Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang

- Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 1, pp. 2062–2074, 2023.
- [3] F. D. E. L. Texto, *BIBLIOTECA DIGITAL*.
- [4] S. Alam, “Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif,” *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 2, no. 1, pp. 81–96, 2019.
- [5] A. Yuristia and M. Pd, “yang mendukung pembangunan dan penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat proses pembangunan, yang dimana nantinya dengan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan pembangunan yang maju,” vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2017.
- [6] S. Wiwitan, *Dinamika penanganan gerakan keagamaan*, vol. 11, no. September. 2012.
- [7] J. A. Marius, “Nalitik perubahan sosial,” vol. 2, no. 2, 2006.
- [8] D. Erfandi, “Pengelolaan Lansekap Lahan Bekas Tambang: Pemulihan Lahan dengan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal (In-Situ),” pp. 55–66, 2017.
- [9] D. A. N. P. Sosial and T. Witono, “aldinelfikri,+Quantum+XVI+(1)+2020+#6.+Toton+Witono.+Pembangunan+Sosial,+Kesejahteraan+Sosial,+&+Pekerjaan+Sosial (3),” vol. XVI, pp. 57–72, 2020.
- [10] E. Suharto, “Kebijakan Sosial Indonesia,” *Kebijak. Sos. Indones.*, pp. 1–18, 2005.
- [11] S. Muadi, I. MH, and A. Sofwani, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik,” *JRP (Jurnal Rev. Polit.*, vol. 6, no. 2, pp. 195–224, 2016, doi: 10.15642/jrp.2016.6.2.195-224.
- [12] P. Bidang *et al.*, “HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PASER , KALIMANTAN TIMUR The Political Economic of Deforestation and Forest Degradation in Paser Regency , East Kalimantan,” pp. 63–80, 2020.
- [13] I. Purwastuty, “Pemberdayaan keluarga miskin melalui aset komunitas,” *Mimb. Kesejaht. Sos.*, no. November, p. hal 11, 2018.
- [14] P. L. Berger, “and Thomas Luckmann The Social Construction of Reality Treatise in the Sociology”.
- [15] K. Willis, *Theories and Practices of Development*.
- [16] I. Khaldun, J. Bodin, L. A. Coser, and A. Pendahuluan, “Teori konflik sosiologi klasik dan modern,” pp. 32–48, 2017.
- [17] I. Abdullah, “PENELITIAN BERWAWASAN GENDER DALAM ILMU SOSIAL,” vol. 15, no. 2, pp. 265–275, 2003.

- [18] “No Title,” pp. 1–22.
- [19] M. B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat,” *J. Konstitusi*, vol. 16, no. 1, p. 148, 2019, doi: 10.31078/jk1618.
- [20] “Handbook of Public Policy Analysis”.
- [21] S. Pembangunan, *Sosiologi pembangunan*.